

**ANALISIS PENILAIAN KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN
DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Andi Reza

NIM : 22 2010 257

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS PENILAIAN KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN
DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Andi Reza

Nim : 22 2020 257

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Reza

NIM : 22 2010 257

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2016
Penulis

Andi Reza
NIM : 222010257

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penilaian Kinerja Penyusunan Anggaran
Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang
Nama : Andi Reza
NIM : 22 2010 257
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing,



(Muhammad Fahmi, S.E., M.Si.)
NIDN. 0029097804

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghazali, S.E., AK, M.Si.)
NIDN. 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ❖ **Hidup tidak akan berarti bila tidak ada target yang ingin diraih, bilapun dirimu gagal jangan pernah takut untuk berdiri kembali.**
- ❖ **Tidak ada yang tidak mungkin bila kita ingin berusaha dan berdoa.**

(Andi Reza)

Terucap syukur pada Mu Allah S.W.T.

Ku persembahkan untuk:

- 1. Ibuku tercinta**
- 2. Kakakku, ayukku dan adikku tersayang**
- 3. Sahabat-sahabatku terbaik**
- 4. Almamaterku**



PRAKATA

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penilaian Kinerja Penyusunan Anggaran Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang**” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, yaitu ayahku Andi Mansyur (Alm) dan Ibuku Erma Heri yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendo'akan, dan memberikan motivasi kepada penulis. Kepada kakak-kakakku yaitu Dina Listi Komalasari, Ixora Albikan Tristani Wilman, Serta Kakak Teno Lauren Vitoni Wilman dan Adik-adikku Andi Rico dan Andi Marisca, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan dorongan semangat dan do'a yang tulus disetiap perjuanganku.

Penulis juga mengucapkan sangat berterimakasih kepada Pak Fahmi., S.E, M.Si yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan izin dan

membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, diantaranya:

1. Bapak Dr. Abid Djazulih, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi, S.E. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Wakil-Wakilnya.
3. Ibu Rosalina Ghozali, S.E. Ak, M.Si., selaku Ketua Progran Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E. M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Staf Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan.

Kerendahan hati yang tulus, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. Amin.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembag, Maret 2016
Penulis

Andi Reza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Sebelumnya	14
B. Landasan Teori	17
1. <i>Good Governance</i>	17

a.	Definisi <i>Good Governance</i>	17
b.	Ciri – ciri <i>Good Governance</i>	19
c.	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	20
d.	Fungsi <i>Good Governance</i>	23
e.	Tujuan <i>Good Governance</i>	24
2.	Partisipasi Penyusunan Anggaran	25
a.	Definisi Partisipasi Penyusunan Anggaran	25
b.	Pentingnya Anggaran	27
c.	Fungsi Anggaran	28
d.	Tujuan Penyusunan Anggaran	30
e.	Proses Penyusunan Anggaran	31
3.	Kinerja	32
a.	Definisi Kinerja	32
b.	Penilaian Kinerja Manajerial.....	33
c.	Dimensi Kinerja Manajerial.....	33
d.	Evaluasi Kinerja Manajerial	36
e.	Tujuan Penilaian Kinerja.....	36
f.	Manfaat Penilaian Kinerja.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
A.	Jenis Penelitian	38
B.	Lokasi Penelitian	38
C.	Operasionalisasi Variabel	39
D.	Data yang diperlukan	39

E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	41
1. Analisis Data	41
2. Teknik Analisis	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang	43
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	44
3. Struktur Organisasi	45
B. Pembahasan Hasil Penelelitian	53
1. Partisipasi (<i>Participation</i>)	57
2. Aturan Hukum (<i>Rule Of Law</i>).....	58
3. Transparansi (<i>Transparancy</i>)	60
4. Berorientasi Pada Kepentingan Publik (<i>Consensus Orientation</i>)	61
5. Berkeadilan (<i>Equity</i>)	62
6. Efisien dan Efektif (<i>Efficiency and Effectiveness</i>).....	63
7. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
A. Simpulan	66
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi jalan umum....	9
Tabel I.2 Target dan Realisasi Retribusi Terminal.....	10
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	16
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	39
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir	53
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Kumulatif	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Lampiran IV.1	
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	Surat Keterangan Dinas Perhubungan Palembang 72
Lampiran II	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi 73
Lampiran III	Daftar Hadir Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa Program Studi Akuntansi Periode Genap 2014-2015 74
Lampiran IV	Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi 75
Lampiran V	Foto <i>copy</i> Sertifikat Hafalan membaca surat-surat pendek Al-Qur'an 76
Lampiran VI	sertifikat TOFEL 77
Lampiran VII	Biodata Penulis 78
Lampiran VIII	Jadwal Penelitian 79

ABSTRAK

Andi Reza/222010257/2016/Analisis Akuntanilitas Publik dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dalam Menilai Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang/ Akutansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip – prinsip *good governance* dalam menilai kinerja penyusunan anggaran Dinas Perhubungan Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip – prinsip *good governance* dalam menilai kinerja penyusunan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip – prinsip *good governance* dalam menilai kinerja penyusunan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip – prinsip *good governance* belum diterapkan secara optimal di Dinas Perhubungan Kota Palembang, sehingga hal ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Partisipasi penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palembang belum mencapai target yang dinilai sebagai indikator yang seharusnya bisa dipenuhi. Partisipasi, aturan hukum, transparansi, berorientasi pada kepentingan publik, berkeadilan, efisien dan efektif, akuntabilitas semua prinsip ini belum diterapkan secara optimal di dinas perhubungan kota Palembang. Masih banyaknya keperluan dalam pengoptimalan atas semua prinsip tersebut meruapak tugas dari organisasi pemerintah kota Palembang ini agar visi dan misi dari dinas perhubungan kota Palembang dapat dicapai dengan optimal.

Kata Kunci : Prinsip – prinsip *Good Governance*, Kinerja Penyusunan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

ABSTRACT

Andi Reza/222010257/ Analysis of assessment performance composing the budget with the approach of good governance on service nexus the city of Palembang.

The problem in this research is how the application of the principles of good governance in assessing the performance of composing the budget of the nexus city of Palembang. The purpose of this research is to gain a picture about the application of the principles of good governance in assessing the performance of composing the budget the port authority the city of Palembang.

Kind of this research is deskriptif. Describe how the application of the principles of good governance in assessing the performance of composing the budget the port authority the city of Palembang. The technique of gathering data using interview, observation, and documentation. Methods of analysis use methods of nalysis kualitatif.

The results of this research show that the principles of good governance haven't applied for optimum in service nexus the city of Palembang, so this effect is insignificant to the performance of the employees service the nexus the city of Palembang. Participation of composing the budget in the service port authority city of Palembang yet reached the target judged as the indicators are supposed to be filled. Participation, Rule Of Law, Transparance, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, and Akuntability, all this principle not applied in optimum in service nexus city Palembang. Still many of the needs in optimums above all the principle that is the duty of the organization of the government the city of Palembang this to the vision and mission of the service the nexus the city of Palembang can be achieved with optimum.

Keyword : the principles of good governance, the performance of composing the budget of the nexus city of Palembang.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas - asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas, oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Didalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacuh untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep yang harus digunakan dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep – konsep dan terminologi birokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Konsep *Good Governance* ini lebih dekat digunakan dalam reformasi sektor publik. Didalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai salah satu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi.

Good Governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (rhius 2015:03)

United Nations Development Programme (UNDP 1997 dalam Kuncoro, 2007) merumuskan istilah *Governance* sebagai suatu penyelenggaraan (*Exercise*) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelolah masalah – masalah sosial. *Governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber – sumber sosial

dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. *Good Governance* itu sendiri mempunyai arti sebagai satu cara untuk mengatur pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karakteristik *Good Governance* mencakup (1)*Participation*, (2)*Rule of Law*, (3)*Transparance*, (4)*Responsiveness*, (5)*Consensus Orientation*, (6)*Equity*, (7)*Efficiency and Effectiveness*, (8)*Accountability*, (9)*Strategic vision*.

Partisipasi masyarakat lahir dari tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan diantara para *stakeholders* yang ada di masyarakat. Antara kelompok sosial dan komunitas dengan para pengambil kebijakan. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti sejak kapan tumbuhnya kesadaran tersebut di masyarakat. Secara sederhana, Partisipasi dapat dimaknai sebagai "*the act of taking part or sharing in something*". Ada dua kata yang dekat dengan konsep partisipasi, yaitu "*engagement*" dan "*involvement*". *Engagement* merujuk pada adanya suatu ikatan atau kesalinghubungan antara para *stakeholders* di masyarakat. Sementara *involvement* merujuk pada adanya suatu persangkutan atau keterlibatan antara para *stakeholders* di masyarakat dalam pembentukan kebijakan (*decision making*). Partisipasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana seluruh pihak (*stakeholders*) dapat terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembuatan kebijakan. (Maul, 2008; 2)

Menurut Ikhsan & Ishak (2007:173), Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan

mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Dengan kata lain ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam mengambil keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kerja. Pemberian kesempatan pada setiap pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi anggaran juga sangat penting, karena aparat pemerintah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya dan dengan adanya kontribusi dari bawahan atau staf dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf pemegang peranan penting dalam pencapaian tujuan.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai (Krina 2006:13). Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Menurut Mardiasmo (2006:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Mardiasmo 2009:15). Prinsip akuntabilitas ini telah menjadi suatu harapan yang nyata bagi masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang, harapan masyarakat ini mensyaratkan agar adanya keterbukaan sektor publik dalam mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi publik. Semua prinsip yang sudah memang seharusnya hidup dalam organisasi sektor publik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat agar prinsip - prinsip *Good Governance* pada dinas perhubungan kota Palembang dapat diterapkan secara baik. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2009: 29).

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetap mencakup juga praktek-praktek kemudahan pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencapai prinsip *Good Governance*, dalam pelayanan terhadap masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah. Adanya UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pemerintah daerah juga harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dimana pelayanan terhadap masyarakat harus dilakukan secara optimal. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Kenis (1979) dalam Bangun (2009). Menurut Hansen & Mowen (2006:377), didalam penyusunan anggaran berarti juga berkaitan dengan sejumlah informasi yang di berikan oleh atasan kepada bawahannya, sehingga terciptanya komunikasi yang baik untuk sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan ramah. Biasanya yang dikomunikasikan ke bawahan adalah yang membantu mengembangkan anggaran yang akan memenuhi suatu tujuan. Anggaran partisipatif mengkomunikasikan rasa tanggungjawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Semua kegiatan inilah yang diharapkan dapat

terlaksana dengan baik sehingga dapat tercapainya prinsip – prinsip *Good Governance* baik dalam kegiatan perencanaan maupun implementasinya.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat. Menurut Wibowo (2012: 10) kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun. Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam proses pelaksanaan aktivitas harus selalu dilakukan monitoring, penilaian dan *review* atau peninjauan ulang terhadap kinerja sumber daya manusia.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi misalnya : kualitas kerja, kuantitas kerja, efisiensi dan kriteria efektivitas lainnya. Selain itu kinerja merupakan gabungan dari tiga factor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas serta perandan tingkat inovasi seorang pekerja. Semakin tinggi ke tiga factor diatas maka jelaslah akan semakin besar kinerja karyawan yang bersangkutan (Hasibuan:2008).

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluarandari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kualitas atau kuantitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

Kinerja merupakan prestasi kerja,yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2007:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara:2006)

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan Instasional, melainkan tahapan-tahapan Instasional yakni berawal dari terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Palembang I berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat II Kodya Palembang.

Setelah berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Realisasi akuntabilitas publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah melakukan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang telah mengupayakan akuntabilitas dalam peningkatan kinerja dalam organisasi. Karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat

tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Dari aspek penyusunan anggaran dinas perhubungan kota Palembang juga dituntut untuk bisa memberikan ruang hak yang sama bagi setiap individu yang berwenang tanpa menilai dari segi jabatan dan kedudukannya dalam hal memberikan opini atau pendapat. Dengan tujuan agar target dan realisasi anggaran dapat dicapai sesuai dengan misi dinas perhubungan kota Palembang.

Berikut contoh salah satu Anggaran yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang target dan realisasi penerimaan Retribusi Kumulatif Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Table 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	Rp. 5.500.000.000	Rp. 3.590.938.700	65.29 %
2011	Rp. 5.775.000.000	Rp. 4.447.905.378	77.02 %
2012	Rp. 11.555.000.000	Rp. 5.723.811.192	49.56 %
2013	Rp. 6.297.000.000	Rp. 5.253.836.863	59.80 %
2014	Rp. 7.241.550.000	Rp. 6.322.212.321	87.30 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2015

Table 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Terminal
Tahun 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	Rp. 2.500.000.000	Rp. 1.413.272.750	56.53 %
2011	Rp. 2.625.000.000	Rp. 1.569.777.000	59.80 %
2012	Rp. 2.625.000.000	Rp. 2.121.309.000	80.81 %
2013	Rp. 5.755.000.000	Rp. 3.785.899.000	65.78 %
2014	Rp. 5.800.000.000	Rp. 3.998.580.000	68.94 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu belum tercapai. Tingkat pencapaian realisasi anggaran rata-rata 50% sedangkan menurut Dinas Perhubungan Kota Palembang minimal 70%. Hal ini mengindikasikan kemungkinan prinsip *Good Governance* pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak diimplementasikan dengan baik sehingga apa yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam melakukan partisipasi penyusunan anggaran dan jumlah keuangan telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan hanya melaksanakan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu tinggi sedangkan sumber daya yang ada tidak mencukupi atau sebaliknya. Selain itu prinsip – prinsip *Good Governance* belum dilaksanakan secara optimal sehingga apa yang telah dianggarkan Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak pernah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang, mengingat pentingnya kinerja dan pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam suatu organisasi publik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penilaian Kinerja Penyusunan Anggaran Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam menilai kinerja penyusunan anggaran dinas perhubungan kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam menilai kinerja penyusunan anggaran pada dinas perhubungan kota Palembang ?

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga dapat memahami pentingnya akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja manajerial.

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk memperhatikan faktor di dalam akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja manajerial.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dan berguna sebagai sumber pengetahuan serta sebagai bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, A. F. M., & Rivai, V. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Profil Dinas Perhubungan Kota Palembang 2015*.
- Hansen, D.R., Mowen, M. 2004. *Akutansi Manajemen*. Terjemahan Dewi Fitriasari. Jakarta: Salemba Empat,
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Indra Bastian. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, A dan Ishak, M. 2005. *Akutansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jajuk Herawati, & Sunarto. 2004. *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Amnus.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN dan BPKP: Jakarta.
- Mahsun, Mohammad, Firma. S, dan Heribertus. 2006. *Akutansi Sektor Publik*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Munandar, M. 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Uiversitas Gajah Mada.
- Nur Indriantoro, & Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Radar Palembang. <http://www.radar-palembang.com/dewan-persoalkan-target-parkir-dishub/>.
- Rhius. 2015. *Pengertian Good Governance untuk mencapai pemerintahan yang baik*. Landasan Teori.com/2015/10.

- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen (Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis)*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Ramadhan. 2015. *Penerapan Prinsip Good Governance (Tata Pemerintah Yang Baik) dalam Manajemen Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda*. *Jurnal, Ilmu Pemerintah*, Vol. 3, No. 2, ISSN 704-717.
- Sa'ban L.M . Azhar. 2014.*Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Bau Bau dalam Perspektif Good Governance tahun 2012*. *Journal Of Governance and Public Policy*, Vol. 1, No. 1, ISSN: 27-52.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sanjaya, Rony Setiawan, Verani Carolina, Nonie Magdalena & Albert Kurniawan. 2013. *Aplikasi SPPS untuk Smart Riset (Program IBM SPPS 21.0)* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 1992. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*. 1999. Jakarta: Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrerian Dalam Negeri.
- Pengertian Transfaransi, googleweblight.com/?lite_url=http://pengertian-pengertian-info.blogspot.com/2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 2006. Jakarta: Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II*. 1990. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja*. 1995. Palembang: Direktorat Jendral Perhubungan.
- Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta